

ABSTRAK

Nurul Shopiatul Hijaz, 2023. 1193030077. Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Dinas Sosial Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan dan kehadiran pemerintah dikarenakan masih banyak yang belum terpenuhi hak-haknya dari 4200 jiwa disabilitas yang ada di Kota Bandung, dengan kasus pelecehan seksual penyandang disabilitas pada tahun 2018 berjumlah 89 kasus, pada tahun 2020 berjumlah 77 kasus dengan kasus yang paling banyak yakni Kekerasan seksual sebesar 42%. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Dinas Sosial Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pertama, Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 di Dinas Sosial Kota Bandung. Kedua, Kebijakan Dinas Sosial Kota Bandung Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019. Ketiga, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kota Bandung.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa teori, yaitu: teori implementasi kebijakan, teori perlindungan hukum, dan teori kemaslahatan dalam Siyasah Dusturiyah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kemudian disajikan secara kualitatif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Kemudian untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis, internet dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Di Dinas Sosial Kota Bandung sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi belum maksimal dikarenakan kurangnya informasi tentang layanan kepada para disabilitas dan keterbatasan disabilitas dalam mengakses pelayanan dinas sosial. *Kedua*, Kebijakan Dinas Sosial Kota Bandung terhadap Implementasi Peraturan Daerah ini yaitu dengan melakukan asesmen, bantuan sosial, dan bimbingan sosial. *Ketiga*, Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi dan kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial berkaitan dengan Peraturan Daerah sudah berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat di Kota Bandung.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Disabilitas, Siyasah Dusturiyah.